

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN
TUJUAN KHUSUS
(Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat)**

ALFIAN FANDI NUGROHO



**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2017**

**PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA***

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2017

Alfian Fandi Nugroho
NIM P052130094

RINGKASAN

ALFIAN FANDI NUGROHO. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat). Dibimbing oleh IIN ICHWANDI dan NANDI KOSMARYANDI.

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya. Hutan Pendidikan dan Latihan Gunung Walat (HPGW) merupakan salah satu KHDTK untuk tujuan pendidikan dan latihan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi dengan pengelolaan oleh Fakultas Kehutanan IPB. Pengelolaan HPGW bertujuan untuk fasilitasi media tridharma perguruan tinggi bagi pengelolaan hutan lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pengelola melalui kelola produksi, kelola sosial, dan kelola lingkungan sebagai landasan fasilitasi program kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK HPGW saat ini adalah masih minimnya peraturan perundangan tentang pengelolaan KHDTK. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan serta kesenjangan dalam implementasi pengelolaan KHDTK HPGW dan merumuskan konsep solusi pengelolaan KHDTK yang dikelola oleh Perguruan Tinggi.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan *indept interview* terhadap permasalahan pengelolaan HPGW serta *content analysis* terhadap peraturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi mempunyai beberapa karakteristik antara lain mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, menjadi media dan sarana penyelenggaraan tridharma serta memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk tujuan pendidikan dan penelitian dalam upaya kemandirian secara finansial. Dalam rangka fasilitasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat saat ini masih mengalami hambatan dikarenakan belum memiliki posisi yang jelas mengenai landasan pengelolaan meliputi kewenangan, organisasi pengelolaan, kegiatan pengelolaan serta pengawasan pengelolaan KHDTK sehingga pengelola HPGW dalam melakukan pengelolaan mengacu pada peraturan perundangan umum dengan melaksanakan perizinan disetiap kegiatan pemanfaatan hutan yang mengakibatkan pengelola mengalami kesulitan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan HPGW. Solusi yang dibutuhkan saat ini adalah diperlukannya peraturan perundangan khusus yang secara tuntas mengatur tentang penyelenggaraan KHDTK secara mandiri dan berkelanjutan dengan ruang kreativitas dan inovasi untuk peningkatan fungsi pelayanan publik tujuan khusus KHDTK.

Kata kunci: Pengelolaan Hutan, KHDTK, kebijakan

SUMMARY

ALFIAN FANDI NUGROHO. Management Policy of Forest Territory with Special Purpose (Case Study of Gunung Walat Educational Forest). Supervised by IIN ICHWANDI and NANDI KOSMARYANDI.

Forest Area with Special Purposes (KHDTK) is a forest area designated by the government for public purpose such as research and development, education and training, and religion and culture. The management of KHDTK is given to customary community, education agencies, research agencies, social and religious agencies. Gunung Walat Education of Forest (HPGW) is one of the KHDTK appointed and established by the government given to University with the management by the Faculty of Forestry IPB. The management of HPGW aims to facilitate the media tridharma (education, research and community service activity) of University for sustainable forest management. To achieve these objectives, various activities are carried out by managers through production managements as the foundation for facilitation of education, research and community service activities. The current problem in management of HPGW is the lack of regulation on KHDTK. This study aims to identify problems and gaps in the implementation of the management of KHDTK and formulate the concept of KHDTK management solutions managed by Universities.

The method used in the study using in depth interview on the management problems of HPGW and content analysis of regulations. Based on the results of the research, it is found that KHDTK management activities have several characteristics such as realizing sustainable forest management, becoming media and facilities for tridharma implementation and utilizing sustainable forest resource potential for educational and research purposes in the effort of financial independence. In the context of facilitation of research, education and community service activity is currently experiencing obstacles. The management of KHDTK does not yet have a clear position on the management platform including authority, management organization, management activities and supervision of KHDTK management. As a result, the management of HPGW in carrying out management refers to general legislation by implementing licencing in every forest utilization activity. Managers have difficulty in order to achieve the purpose of management of HPGW. Special regulations are required that fully regulate the implementation of KHDTK independently and sustainably with space of creativity and innovation to improve the function of public services for the special purposes of KHDTK.

Keywords: Forest management, forest management of the special purpose, Policy

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2017
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN
TUJUAN KHUSUS
(Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat)**

ALFIAN FANDI NUGROHO

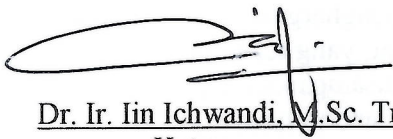
Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains
pada
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan

**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2017**

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr. Yulius Hero, M.Sc. F. Trop.

Judul Tesis : Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat)
Nama : Alfian Fandi Nugroho
NIM : P052130094

Disetujui oleh
Komisi Pembimbing



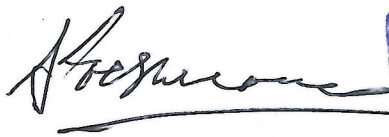
Dr. Ir. Iin Ichwandi, M.Sc. Trop
Ketua



Dr. Ir. Nandi Kosmaryandi, M.Sc. F. Trop.
Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Pengelolaan Sumberdaya
Alam dan Lingkungan



Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana



Dekan Sekolah Pascasarjana

Intan Kumala Putri, M.Si.

Tanggal Ujian: 18-09-2017

Tanggal Lulus : 24 OCT 2017

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2016 ini ialah perencanaan pengelolaan sumber daya, dengan judul Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Iin Ichwandi, M.Sc. Trop. dan Bapak Dr. Ir. Nandi Kosmaryandi, M.Sc. F. Trop. selaku pembimbing yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Pengelola Hutan Pendidikan Gunung Walat, yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak, Ibu, Istri, Anak serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Oktober 2017

Alfian Fandi Nugroho

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| 1 PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang | 1 |
| Tujuan Penelitian | 4 |
| Manfaat Penelitian | 4 |
| Ruang Lingkup Penelitian | 4 |
| 2 METODE | 4 |
| Lokasi Penelitian | 4 |
| Metode Pengumpulan Data | 5 |
| Tahapan Penelitian | 6 |
| 3 HASIL DAN PEMBAHASAN | 8 |
| Kondisi Umum KHDTK HPGW | 8 |
| Kondisi Eksisting Pengelolaan HPGW | 12 |
| <i>Content Analysis</i> Pengelolaan KHDTK | 19 |
| Tantangan Pengelolaan KHDTK HPGW | 21 |
| Karakteristik Pengelolaan KHDTK | 28 |
| Kesenjangan Pengelolaan KHDTK dengan Aturan Perundangan | 29 |
| Referensi Pengelolaan Hutan Pendidikan | 33 |
| Solusi Permasalahan Pengelolaan KHDTK | 38 |
| 4 SIMPULAN DAN SARAN | 41 |
| Simpulan | 41 |
| Saran | 41 |
| DAFTAR PUSTAKA | 42 |
| LAMPIRAN | 46 |
| RIWAYAT HIDUP | 52 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| KHDTK yang diberikan kepada Perguruan Tinggi | 2 |
| KHDTK yang diberikan kepada Perguruan Tinggi | 3 |
| Matrik sejarah pengelolaan HPGW | 9 |
| Sembilan amar keputusan didalam SK.188/Menhut-II/2005 | 10 |
| Jumlah pengunjung KHDTK HPGW | 18 |
| <i>Content analysis</i> aturan kemitraan kehutanan oleh pengelola KHDTK | 26 |
| Kesenjangan (gap) peraturan dengan pengelolaan KHDTK HPGW | 30 |
| Peraturan yang harus dijalani dalam pengelolaan KHDTK | 31 |
| Perbandingan Pengelolaan HPGW dan Duke Forest | 37 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Lokasi HPGW | 5 |
| Kerangka Pemikiran | 6 |
| Struktur Organisasi Pengelolaan HPGW | 13 |
| Kegiatan Pengelolaan HPGW | 14 |
| Produktivitas getah kopal | 17 |
| Alur pemberian IPHHBK oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat | 23 |
| Alur penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu | 24 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Daftar KHDTK Penelitian dan pengembangan | 47 |
| Daftar KHDTK religi dan budaya atau KHDTK kebun raya | 50 |
| Daftar KHDTK Pendidikan dan Pelatihan | 51 |

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. KHDTK dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan keagamaan. Sampai saat ini sebanyak 67 KHDTK telah diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan keagamaan dengan 16 diantaranya diberikan kepada Perguruan Tinggi sebagai sarana penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan inovasi kehutanan yang memadai (Tabel 1). KHDTK yang dikelola oleh Perguruan Tinggi mempunyai nilai strategis dikarenakan berperan penting sebagai media pembelajaran untuk berlangsungnya riset-riset dan inovasi kehutanan yang menjadi sumber atau bahan pengambil keputusan pemerintah yang berbasis riset. Dalam penelitian ini dilaksanakan studi kasus di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW).

HPGW merupakan salah satu hutan pendidikan dengan luas 359 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi. HPGW telah dikelola oleh Fakultas Kehutanan IPB sejak tahun 1969. Pada awal pengelolaan, kondisi kawasan HPGW adalah hutan rawang yang dikelilingi oleh desa, kebun masyarakat dan kondisi hutan yang tidak masuk dalam kelas perusahaan serta dalam keadaan terlantar (HPGW 2009). Tahun 1980 seluruh kawasan HPGW telah selesai ditanami dan terus tumbuh menjadi hutan yang lebat dengan penutupan hutan lebih dari 95% dengan berbagai jenis pohon (HPGW 2014). Hal tersebut menjadikan pengelolaan HPGW sebagai salah satu bukti keberhasilan dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Sejak tahun 1969 HPGW mengalami beberapa perubahan kebijakan. Pada tahun 1969, kebijakan Kepala Jawatan Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 7041/IV/69 tertanggal 14 Oktober 1969 menetapkan Hutan Gunung Walat seluas 359 hektar ditunjuk sebagai Hutan Pendidikan yang pengelolaannya diserahkan kepada IPB. Kemudian pada tahun 1973 keluar kebijakan Menteri Pertanian nomor: 008/Kpts/DJ/I/73 tentang penunjukan kompleks Hutan Gunung Walat menjadi Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Pengelolaan kawasan hutan Gunung Walat seluas 359 hektar dilaksanakan oleh IPB dengan status hak pakai sebagai hutan pendidikan dan dikelola Unit Kebun Percobaan IPB dengan jangka waktu 20 tahun. Pada tahun 1992, kebijakan Menteri Kehutanan melalui SK 687/Kpts-II/1992 tentang Penunjukan Komplek Hutan Gunung Walat Sebagai Hutan Pendidikan, pengelolaan kawasan Hutan Gunung Walat sebagai Hutan Pendidikan dilaksanakan bersama antara Fakultas Kehutanan IPB dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan/Balai Latihan Kehutanan (BLK) Bogor. Kemudian pada tahun 2005, status hukum kawasan HPGW pada tahun 2005 dikuatkan oleh diterbitkannya SK Menhut No. 188/Menhut – II/2005, yang menetapkan fungsi hutan kawasan HPGW sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan pengelolaannya diserahkan kepada Fakultas Kehutanan IPB dengan tujuan

khusus sebagai Hutan Pendidikan dengan jangka waktu 20 tahun. Kemudian pada tahun 2009 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 702/MENHUT-II/2009 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 188/Menhut-II/2005 yang mencakup perubahan administrasi kecamatan dan penghapusan batas berlakunya SK.

Fakultas Kehutanan IPB sebagai pemegang mandat hak pengelolaan HPGW dalam melaksanakan pengelolaan berpedoman pada Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan IPB Nomor: 35/I3.5/KP/2008 tentang Garis-Garis Besar Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Gunung Walat 2009-2020. Pengelolaan HPGW bertujuan untuk fasilitasi media tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) bagi pengelolaan hutan lestari. Untuk mencapai tujuan pengelolaan tersebut, berbagai kegiatan yang dilaksanakan meliputi manajemen kawasan, manajemen hutan, dan penataan kelembagaan. Kegiatan manajemen kawasan antara lain pemantapan status dan fungsi kawasan, penataan kawasan dan pengamanan kawasan. Kegiatan Manajemen hutan meliputi kelola produksi, kelola sosial, dan kelola lingkungan sebagai landasan fasilitas program kegiatan tridharma Fakultas Kehutanan IPB. Kegiatan penataan kelembagaan dilaksanakan dengan mengembangkan sistem manajemen HPGW, menata dan membangun proses pembelajaran organisasi, mengembangkan sumber daya manusia organisasi, menggali dan mengelola sumber pendanaan, membangun dan mengelola sarana dan prasarana, mengembangkan dan mengelola kemitraan dan jejaring HPGW dengan para pihak. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut, Fakultas Kehutanan IPB membentuk Badan Pengelola HPGW yang terdiri dari Badan Pengurus (BP-HPGW) dan Badan Pelaksana (BE-HPGW).

Saat ini landasan hukum pengelolaan KHDTK masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengelolaan KHDTK masih sangat beragam dan sangat tergantung pada pemegang hak pengelola. Masih terbatasnya peraturan tentang KHDTK menjadi alasan bahwa penelitian tentang kebijakan pengelolaan KHDTK perlu untuk dilaksanakan. Menurut Anderson (1983) kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Penelitian ini dilaksanakan dengan analisis yang berorientasi pada permasalahan yang terdapat di lapangan dalam pengelolaan KHDTK. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan antara lain dengan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan adopsi kebijakan. Penyusunan agenda dilaksanakan dengan memilih masalah-masalah yang akan menjadi prioritas untuk dibahas. Formulasi kebijakan dilaksanakan dengan menentukan masalah yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan. Sedangkan adopsi kebijakan dilaksanakan dengan pemilihan alternatif solusi yang ditawarkan sebagai solusi atas permasalahan. Danim (2005) menyatakan bahwa proses penelitian kebijakan pada hakikatnya merupakan penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan permasalahan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mungkin diperlukan pembuat kebijakan dalam rangka pemberian solusi terhadap masalah-masalah pengelolaan KHDTK.

Tabel 1 KHDTK yang diberikan kepada Perguruan Tinggi

| No. | Nama KHDTK | No SK Menteri LHK | Pengelola KHDTK |
|-----|---|---|---|
| 1. | Hutan Pendidikan dan Pelatihan Muhammadiyah Bengkulu | SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu |
| 2. | Hutan Pendidikan Gunung Geulis | SK.162/Menhut-II/2013 | Perhutani Unit III dan Institut Teknologi Bandung |
| 3. | Hutan Pendidikan dan Latihan Gunung Walat | SK. 188/MENHUT-II/2005 jo. SK. 702/MENHUT-II/2009 | Fakultas Kehutanan Institut |
| 4. | Hutan Pendidikan dan Pelatihan (Universitas Gajah Mada) | SK.632/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 | Universitas Gajah Mada |
| 5. | Hutan Pendidikan dan Pelatihan Wanagama I | SK.493/Menlhk-Setjen/2015 | Universitas Gajah Mada |
| 6. | Hutan Pendidikan (Karang Ploso - Universitas Brawijaya) | SK.676/Menlhk-Setjen/2015 | Universitas Brawijaya |
| 7. | Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Muhammadiyah Mataram | SK.405/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 | Universitas Muhammadiyah Mataram |
| 8. | Hutan Penelitian Universitas Mataram | SK.392/Menhut-II/2004 | Universitas Mataram |
| 9. | Hutan Pendidikan dan Pelatihan (Universitas | SK.656/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 | Universitas Tanjungpura |
| 10. | Hutan Pendidikan (Universitas Muhammadiyah Palangka Raya) | SK.611/Menhut-II/2014 | Pemda Kota Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya |
| 11. | Hutan Pendidikan dan Pelatihan (Universitas Lambung Mangkurat) | SK.900/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2016 | Universitas Lambung Mangkurat |
| 12. | Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman | SK.160/Menhut-II/2004 | Universitas Mulawarman |
| 13. | Hutan Pendidikan dan Pelatihan (Universitas Tandulako) | SK.661/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 | Universitas Tandulako |
| 14. | Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu | SK.260/Menhut-II/2011 | Universitas Muhammadiyah Palu |
| 15. | Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin | SK.86/Menhut-II/2004 | Universitas Hasanuddin |
| 16. | Hutan Pendidikan Gorontalo | SK.201/Menhut-II/2004 | Universitas Gorontalo |
| 17. | Hutan Pendidikan dan Pelatihan (Universitas Tanjungpura) | SK.656/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 | Universitas Tanjungpura |

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi,
2. Menganalisis kesenjangan (gap) peraturan perundang-undangan dengan pengelolaan KHDTK,
3. Merumuskan konsep solusi pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi Pengelola, menjadikan penelitian ini sebagai masukan untuk pengelolaan KHDTK kedepannya.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan/ penyempurnaan peraturan teknis terkait pengelolaan KHDTK
3. Bagi Penulis, penelitian ini dapat dijadikan sarana belajar memahami pengelolaan KHDTK yang berkelanjutan.
4. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai model pengelolaan di HPGW.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan oleh KHDTK HPGW serta potensi pemanfaatan yang dapat diusahakan. Peraturan perundangan yang dianalisis meliputi Undang-undang sampai ke Keputusan Menteri.

2 METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Hutan Pendidikan Gunung Walat Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (HPGW). Secara geografis HPGW berada pada 106°48'27"BT sampai 106°50'29"BT dan 6°54'23"LS sampai -6°55'35"LS dengan luas 359 ha. Lokasi HPGW dilihat pada Gambar 1. Secara administrasi pemerintahan, HPGW terletak di wilayah Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Cicantayam, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan secara administrasi kehutanan termasuk dalam wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Sukabumi. Batas langsung kawasan HPGW antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batununggal dan Desa Sekarwangi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cicantayam dan Desa Cijati
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hagermanah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hagermanah